

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman rakyat. Salah satu cara untuk mencapai upaya tersebut adalah melalui pembangunan ekonomi. Pemerintah melakukan berbagai inisiatif pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membandingkan berbagai kegiatan pembangunan di daerah-daerah yang tingkat kesejahteraannya relatif tinggi. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah jumlah penduduk miskin. Masalah kemiskinan merupakan isu penting yang ditanggapi serius oleh pemerintah di setiap negara, tetapi tidak terlalu umum di Indonesia.³

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan alat untuk meningkatkan kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan nonpangan yang diakibatkan oleh pengeluaran.⁴ Masalah kemiskinan diartikan sebagai kurangnya kebutuhan material, kebutuhan sosial, pengucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan masyarakat, serta kurangnya pendapatan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan merupakan masalah serius dan global yang terjadi di sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang tidak hanya memiliki tingkat pendapatan yang kecil tetapi juga

³ Muhammad Idris Thahir, Baharuddin Semmaila, and Aryati Arfah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Takalar," *Journal of Management Science (JMS)* 2, no. 1 (2021): 61–81, <https://doi.org/10.52103/jms.v2i1.323>.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *PROVINSI JAWA TIMUR DALAM ANGKA Jawa Timur Province in Figures 2024*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, vol. 47, 2024, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

memiliki akses yang terbatas terhadap kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi.⁵

Berikut ini disajikan tabel mengenai total persentase kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 hingga tahun 2023:

Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Tabel 1.1

Total Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	
2014	12,28
2015	12,34
2016	12,05
2017	11,77
2018	10,98
2019	10,37
2020	11,09
2021	11,4
2022	10,38
2023	10,35

Sumber : data BPS Jawa Timur (diolah, 2025)

Dari tabel diatas tampak bahwa persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota cenderung mengalami fluktuasi, dimana tingkat kemiskinan di Jawa Timur umumnya mengalami penurunan dari Maret 2022 hingga Maret 2023, dengan pengecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2015 adalah 12,34%, dan tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2023 adalah 10,35%. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan

⁵ Royan Gilbran Maulana, FX Gugus Febri Putranto, and Ifan Deffinika, "The Determinants Of Extreme Poverty Among Working Households in East Java," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJISE)* 7, no. 2 (2024): 2416–34.

September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.⁶

Meningkatkan laju Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu cara mengatasi kemiskinan. Indeks ini sangat penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.⁷ Untuk mencapai pembangunan yang berkualitas, keterkaitan diperlukan untuk sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan masyarakat di negara-negara industri tertentu.⁸ Sebuah pendekatan baru untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berfokus pada pembangunan manusia secara keseluruhan. UNDP menyatakan bahwa pembangunan manusia memberi masyarakat lebih banyak pilihan. Untuk mencapai tingkat pembangunan manusia ini, diperlukan peningkatan aspek seperti kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.⁹

Berdasarkan tiga aspek utama kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikembangkan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia. IPM dikembangkan dengan menggunakan tiga dimensi utama: kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.¹⁰ Ketiga aspek dasar masyarakat tersebut berhubungan dengan sejumlah besar komponen yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup dan angka kelahiran suatu wilayah adalah variabel yang digunakan untuk mengukur

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *PROFIL KEMISKINAN JAWA TIMUR TAHUN 2023*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur., vol. 44, 2023, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

⁷ Mutiara Syabila and Miftahul Khair, "DINAMIKA KEMISKINAN DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2023," *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 3, no. 1 (2022): 1–7.

⁸ BPS Provinsi Jawa Timur, "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2023," in *Badan Pusat Statistik*, vol. 6, 2023, 1–78, <https://jatim.bps.go.id/publication/2024/05/20/6db5b563181355d2c47485e1/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-jawa-timur-2023.html>.

⁹ Dwi Nurvita et al., "The Role of Public Spending on Education, Health, and Economic Growth toward Human Development Index in the Local Economy," *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business* 6, no. June (2022): 197–210, <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.197-210>.

¹⁰ Lora Ekana Nainggolan et al., "How Determinants of the Human Development Index Impact Indonesia," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 2 (2022): 688–701, <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i2.2477>.

dimensi kesehatan. Data yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan terdiri dari rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf di suatu wilayah. Indikasi kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan, yang diperoleh dari rata-rata pengeluaran per kapita, digunakan untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak.¹¹

Pemerintah mengimplementasikan program desentralisasi untuk mendorong ekspansi ekonomi. Program ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah daripada pemerintah federal. Tujuannya adalah untuk mencegah ketidakadilan regional. Otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengeluaran pemerintah daerah digambarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dibuat untuk satu tahun fiskal dan mencakup data pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah.¹²

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (d disesuaikan) meningkat. Hasil Susenas bulan Maret menjadi sumber data untuk HLS dan RLS. Pada dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah (RLS) untuk orang berusia 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,03 menjadi 8,11 tahun pada tahun 2023, sementara harapan lama sekolah (HLS) untuk orang berusia 7 tahun meningkat 0,01 tahun, dari 13,37 menjadi 13,38 tahun pada tahun sebelumnya.¹³ Pengeluaran per kapita tahunan dihitung berdasarkan angka Susenas bulan Maret. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi dapat dicapai melalui komitmen pemerintah yang kuat terhadap inisiatif pembangunan manusia, terutama dilihat dari besarnya anggaran sektor publik.

¹¹ Zudrun Maryozi, B. Isyandi, and Ando Fahda Aulia, "Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau," *Jurnal Niara* 15, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7380>.

¹² Undang-Undang RI No. 33, "UU RI Nomor 33 Tahun 2004," *Undang-Undang Republik Indonesia* 2004, no. 5 (2004): 9, http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2469_C.pdf.

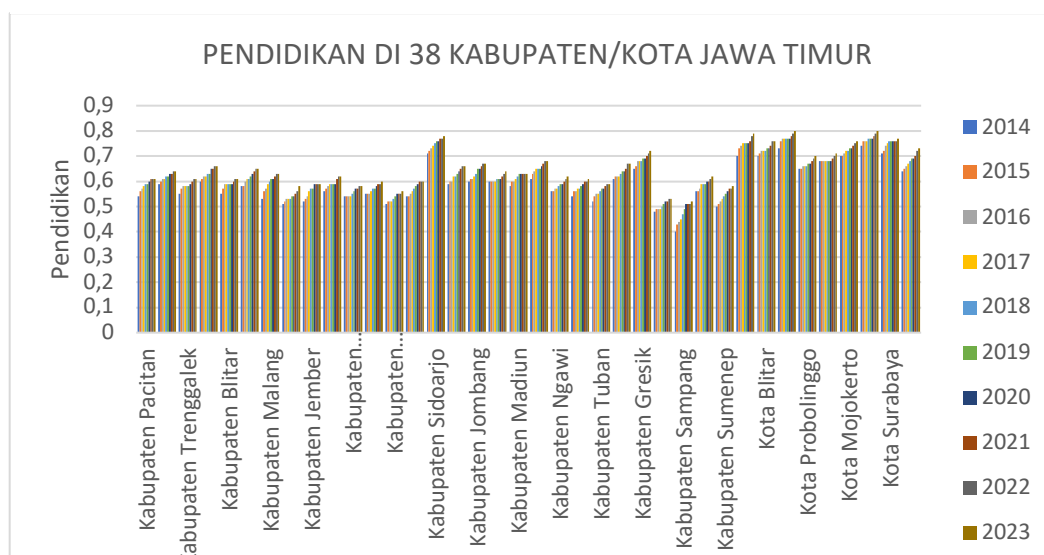
¹³ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Www.Bps.Go.Id," Badan Pusat Statistik Indonesia, n.d.

Indeks pembangunan manusia (IPM) digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia, menurut Pusat Statistik (BPS). Skor ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui metrik seperti pencapaian pendidikan, daya beli, dan kesehatan. IPM menunjukkan perbedaan dalam pembangunan manusia antara wilayah timur (IBT) dan barat (IBB). Sepuluh provinsi memiliki skor terendah di wilayah IBT. Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Kalimantan Barat. DKI Jakarta, Riau, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau juga termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Satu-satunya provinsi IBT yang dianggap memiliki IPM tinggi adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.¹⁴

Berdasarkan bidang pendidikan di Jawa Timur tahun 2014-2023 secara lebih rinci sebagaimana tercantum dalam grafik tersebut.

Pendidikan Kabupaten Se-Jawa Timur tahun 2014-2023

Tabel 1.2



Sumber : Data BPS Jawa Timur (diolah, 2024)

¹⁴ Zulfikar Hasan, "The Effect of Economic Growth and Human Development Index on Poverty in Indonesia," *Journal of Economics and Sustainability* 3, no. No.1 (2021): 42–53, <https://doi.org/10.32890/jes2021.3.1.5>.

Tabel 1.2 menunjukkan angka Pendidikan di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023 dikalkulasi sebanyak 0,64 di tahun terakhir. Dari tahun 2014 hingga sekarang, setiap kabupaten di Jawa Timur mengalami peningkatan. Tetapi pencapaian di setiap kabupaten sangat berbeda. Persentase terbesar penduduk berusia 10 tahun ke atas hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar (SD) ke bawah, 46,22%. Persentase orang yang menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat juga tidak terlalu tinggi, masing-masing 20,59% dan 24,72%.¹⁵ Pada kenyataannya, hanya sekitar 8,47% orang berusia 10 tahun ke atas yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan pasca-sekolah menengah. Indikasi ini masih rendah dan tidak memadai.

Menurut teori Adolf Wagner, aktivitas dan pengeluaran pemerintah meningkat karena teori makro. Wagner mengacu pada hukum peran pemerintah yang terus meningkat sebagai kecenderungan ini. Inti dari argumen Wagner adalah bahwa peran pemerintah semakin besar dalam aktivitas dan kehidupan ekonomi masyarakat. Akibatnya, anggaran pendidikan akan meningkat sebagai hasil dari kebijakan pemerintah daerah, yang akan berdampak pada peningkatan anggaran pemerintah daerah untuk IPM di bidang pendidikan.¹⁶

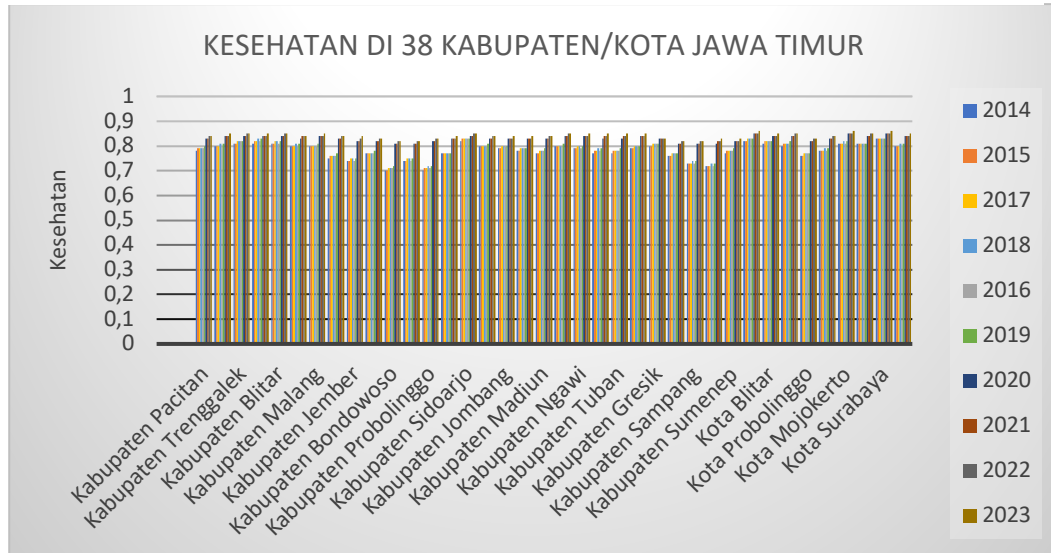
Berdasarkan capaian bidang kesehatan secara lebih rinci sebagaimana tercantum dalam grafik tersebut.

¹⁵ Indonesia, "Www.Bps.Go.Id."

¹⁶ Rima Melati Anggraeni, Moh Khusaini, and Ferry Prasetyia, "The Influence of Government Spending in Education and Health Sector Towards Human Development Index in Java Island," *Science and Education* 2 (2023): 971–77.

Kesehatan Kabupaten Se-Jawa Timur tahun 2014-2023

Tabel 1.3



Sumber : Data BPS Jawa Timur (diolah, 2024)

Tabel 1.3 menunjukkan Pada tahun sebelumnya, tingkat kesehatan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur adalah 27,31%, dengan 11,16% penduduk mengalami masalah kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Di antara wanita yang pernah menikah berusia 15-49 tahun di Jawa Timur pada tahun 2023, 98,74% persalinan ditolong oleh tenaga medis, namun 1,26% persalinan ditolong oleh tenaga non-medis. Berdasarkan hal tersebut, masih banyak yang harus dilakukan dalam pengelolaan kesehatan di daerah terpencil yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Studi telah menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia dan kesehatan. Tidak ada korelasi yang kuat antara alokasi anggaran untuk layanan kesehatan di negara-negara Asia Tenggara dan hasil kesehatan. Selain itu, tidak ada korelasi antara pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan dan pertumbuhan jangka panjang, harapan hidup saat lahir, dan angka kematian orang dewasa. Setiap negara menghadapi masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Hal ini

dapat menyebabkan masalah mendasar dengan pembagian anggaran kesehatan.¹⁷

Meningkatkan kesehatan adalah prioritas sosial penting karena kualitas kesehatan yang baik akan meningkatkan kompetensi, efisiensi, dan kualitas hidup tenaga kerja. Pengeluaran perawatan kesehatan memiliki efek positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara-negara Asia memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi global. Ini berarti pemerintah harus mempertimbangkan korupsi, birokrasi, kurangnya investasi, dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang berhubungan langsung dengan kesehatan.¹⁸

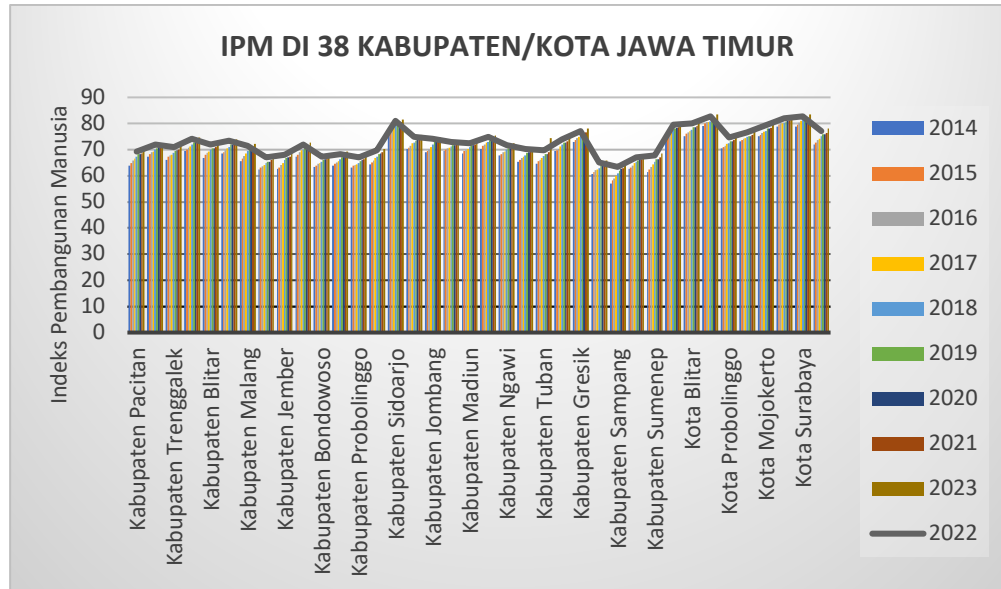
Berdasarkan capaian bidang Indeks Pembangunan Manusia secara lebih rinci sebagaimana tercantum dalam grafik tersebut.

¹⁷ Danielle Ann et al., “Assessing the Relationship of Human Development Index (HDI) and Government Expenditure on Health and Education in Selected ASEAN Countries,” *International Journal of Social and Management Studies* 4, no. 6 (2023): 13–26, <http://www.ijosmas.org>.

¹⁸ Cheng Feng Wu et al., “Measuring the Impact of Health on Economic Growth Using Pooling Data in Regions of Asia: Evidence From a Quantile-On-Quantile Analysis,” *Frontiers in Public Health* 9, no. August (2021): 1–7, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.689610>.

IPM Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur tahun 2014-2023

Tabel 1.4



Sumber : data BPS Jawa Timur (diolah, 2023)

Indeks pembangunan manusia adalah indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis tiga elemen dasar Kesehatan (Angka Harapan Hidup), Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah) maupun Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita). Dari pencapaian IPM pada tabel 1.4 bahwasanya peningkatan konsisten menunjukkan peningkatan secara terus menerus disetiap tahunnya yang terjadi di Data IPM Jawa Timur menunjukkan kemajuan positif, tetapi masih ada ketimpangan. Kabupaten Sampang meningkat 7,15% dari 56,98% pada tahun 2014 ke 64,13% pada tahun 2023, dan Kota Surabaya meningkat 4,58% dari 78,87% pada tahun 2014 ke 83,45% pada tahun 2023. Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Surabaya 83,45%, Kota Malang 83,39%, dan Kabupaten Sampang 64,13%. Untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, bidang pembangunan manusia harus diperkuat secara holistik, terutama di daerah dengan IPM rendah.

Penelitian dari Hilyati Inayah dkk,¹⁹ bahwa zakat salah satu cara menurunkan tingkat kemiskinan. Hasilnya menunjukkan kemungkinan penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,76% yang dicapai BAZNAS dan pengelola zakat lainnya pada bulan September 2022. Nilai ini masih rendah dibandingkan dengan data Outlook Zakat Indonesia 2022, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 600 jaringan Lembaga Pengelola Zakat.

Hasil pengumpulan data zakat Jawa Timur 2014-2023 menunjukkan bahwa tidak ada data untuk tahun 2014-2018.²⁰ Menurut data zakat kabupaten/kota Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang mengalami peningkatan. Jumlah tersebut meningkat dari 50,5 miliar pada tahun 2019 menjadi 116,4 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, Kabupaten Jombang meningkat dari 1,1 miliar pada tahun 2019 menjadi 8,5 miliar pada tahun 2023. Selanjutnya, Kabupaten Tulungagung meningkat secara konsisten dari 2,5 miliar pada tahun 2019 menjadi 3,5 miliar pada tahun 2023.

Perekonomian Jawa Timur mulai pulih, dan dengan kontribusi 25,22%, masih menjadi provinsi terbesar kedua di Jawa. Namun, pertumbuhan tahunan, triwulanan, dan kumulatif Jawa Timur masih lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kinerja 4,69% y-o-y, 0,89% qtq, dan 4,95% etc.²¹ Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019-2024 adalah provinsi yang adil, makmur, unggul, dan bermoral, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif, dan kerja sama dan pendampingan.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 mengajukan Jawa Timur untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu Jawa Timur memiliki potensi yang besar dalam hal sumber daya alam dan bagaimana sumber daya alam tersebut dapat memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk

¹⁹ Hilyati Inayah Siregar et al., "The Role of Zakat in the Economy and Poverty Alleviation," *International Journal of Science, Technology & Management* 4, no. 5 (2023): 1206–10, <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i5.919>.

²⁰ BAZNAS Indonesia, "Ppid.Baznas.Go.Id," n.d.

²¹ Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur, "Kajian Fiskal Regional Tahun 2023," 2024.

terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.²²

Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan baru atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau orang yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.²³ Pengangguran juga merupakan salah satu kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, yaitu ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, menyebabkan mereka merasa frustrasi, putus asa, dan kesulitan finansial.²⁴ Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 4,19 persen, atau 1,17 juta orang, dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada bulan Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, atau 1,17 juta orang. Pengangguran di Jatim juga mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, mencapai 1,55 persen poin. Misalnya, pada Agustus 2021, pengangguran sebesar 5,74 persen, pada Agustus 2022, turun menjadi 5,49 persen, dan pada Agustus 2023, turun menjadi 4,88 persen. Ini menunjukkan bahwa pengangguran di Jatim menjadi penurunan kedua terbesar di pulau Jawa, dengan 0,69 persen lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,32.²⁵

Tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 14,23 menjadi 10,23% di tahun 2023.²⁶ Angka kemiskinan menurun menjadi 9,79% pada Maret 2024, pertama kali menembus satu digit. Penurunan 206.120 orang selama periode tersebut, dengan Jawa Timur berkontribusi 30,34%

²² “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045” (Surabaya, 2024).

²³ Indonesia, “Www.Bps.Go.Id.”

²⁴ Nabila Jennanda Ridwan, Maulidiah Indira Hasmarini, and Universitas Muhammadiyah Surakarta, “Analysis Of The Effect Of The Number Of Poor Population , Open Unemployment Rate , And Grdp On Crime In East Java Province In 2019-2022 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin , Tingkat Pengangguran Terbuka , Dan Pdrb Terhadap Kejahatan Di Provinsi Jawa ,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 6, no. 3 (2025): 2711–20.

²⁵ Dinas Sosisal Provinsi Jawa Timur, “Www.Dinsos.Jatimprov.Go.Id,” n.d.

²⁶ Timur, *PROFIL KEMISKINAN JAWA TIMUR TAHUN 2023*.

terhadap penurunan nasional.²⁷ Menurut penelitian M Syifaul Qalbi dkk²⁸ Faktor pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan partisipasi pendidikan harus menjadi fokus utama upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Ini karena faktor jumlah penduduk dan tingkat pengangguran menunjukkan korelasi positif yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

Menurut pernyataan dari Shinta Rifianing dkk²⁹ analisis kemiskinan struktural pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 hingga 2022 menggunakan Indeks Pembangunan Gender, Rasio Gini, dan Angka Harapan Hidup. Ini menunjukkan bagaimana ketimpangan gender dan ketimpangan akses kesehatan memengaruhi kemiskinan di Jawa Timur. Berbanding sebalik dengan penelitian dari Nabilah Sa'diyah dan Laila M. Pimada³⁰ dari indikator berikut: tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, dan tingkat pendidikan. Tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum memengaruhi tingkat kemiskinan.

Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur terus menurun, tetapi angkanya masih tinggi, di atas 10%, yang merupakan angka tertinggi ketiga di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah masalah yang serius. Garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur telah melampaui nasional dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalah ini. Agar UMKM dapat menyerap lebih banyak uang, mereka harus menciptakan lapangan kerja yang layak dan terus meningkatkannya.³¹

²⁷ BPS Jawa Timur, *PROFIL KEMISKINAN JAWA TIMUR TAHUN 2024*, vol. 3 (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).

²⁸ Evita Nurul Izzah Purnamasari, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa," *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 8, no. 01 (2024): 123–33, <https://doi.org/10.22219/jie.v8i01.31768>.

²⁹ Shinta Rifianing Prasetya, Wiwin Priana Primandhana, and Wiry Wardaya, "Uncovering the Roots of Structural Poverty in East Java Province : An Analysis of Determinants," *International Journal Of Economic, Business and Innovation Research* 03, no. 05 (2024): 431–47.

³⁰ Nabilah Sa'diyah and Laila M. Pimada, "Socioeconomic Dynamics and Poverty Rate in East Java: A Panel Regression Investigation," *Journal of Developing Economies* 9, no. 1 (2024): 107–27, <https://doi.org/10.20473/jde.v9i1.51515>.

³¹ Miftah Hamdan Malik and Yuni Prihadi Utomo, "ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2022 ANALYSIS OF

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 10,35%, turun 0,14 persen poin dari September 2022 dan 0,03 persen dari September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 4,189 juta orang, turun 0,048 juta orang dari September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 7,78%, turun menjadi 7,75% pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 7,75%, turun menjadi 7,75% pada Maret 2023.³²

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan di Badan Amil Zakat Nasional dengan mengambil data sekunder akun website BPS Jawa Timur dan BAZNAS Jawa Timur, pemilihan lokasi di Jawa Timur dengan alasan bahwa peneliti ingin meneliti capaian pengangguran yang masih perlu perbaikan dengan variabel yang sesuai dalam kajian penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tentang indeks pembangunan manusia khususnya di wilayah 38 kabupaten Se-Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data *time series* dengan periode tahun 2014-2023 dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tantangan Jawa Timur dalam mencapai sasaran pembangunan. Sehingga peneliti tertarik untuk menemukan fakta mengenai seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat terhadap Kemiskinan terkhusus di 38 Kabupaten Se-Jawa Timur, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“pengaruh belanja pemerintah di bidang Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat terhadap Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai variabel Moderasi di Jawa Timur Periode 2014-2023”**.

THE DETERMINANTS OF POVERTY IN THE PROVINCE EAST JAVA PROVINCE IN 2018-2022,” *Jurnal Menara Ekonomi X*, no. 1 (2024).

³² Timur, *PROFIL KEMISKINAN JAWA TIMUR TAHUN 2023*.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Belanja pemerintah di bidang Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat adalah salah satu cara menjadi tolak ukur sebagai salah satu mengetaskan kemiskinan. Dimana Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat berpotensi mempengaruhi tingkat Kemiskinan.³³ Oleh karena itu penelitian dilakukan. Hubungan kompleks antara akses Pendidikan rendah, layanan kesehatan yang tidak memadai dan kontribusi zakat dalam meningkatkan kualitas hidup serta Indeks Pembangunan Manusia yang rendah seringkali berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan yang tinggi.³⁴ Adanya kesenjangan tersebut maka penelitian ini dilakukan.
- b. Belanja pemerintah di bidang Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam proses penurunan kemiskinan. Seiring berkembangnya teknologi banyak mengubah sistem pendidikan Indonesia yang harusnya mempermudah akses pendidikan diseluruh elemen masyarakat Indonesia.³⁵ Peningkatan partisipasi dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam pemenuhan beasiswa bagi keluarga yang mampu, perbaikan infrastruktur akses ke sekolah serta integrasi teknologi pendidikan meningkatkan pelatihan guru menjadi tenaga pendidik yang

³³ Idris Thahir, Semmaila, and Arfah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Takalar."

³⁴ Noviatu Soliha, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Kesehatan, Ketimpangan Pendapatan, Dan Upah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)* 4, no. 3 (2022): 209–22.

³⁵ Sinarta Putra P. Surbakti, Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing, "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2015-2021," *Ecoplan* 6, no. 1 (2023): 37–45, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.631>.

mumpuni dan memberikan tunjangan yang layak bagi guru di daerah terpencil.³⁶ Dari kelemahan memungkinkan penelitian ini dilakukan.

- c. Pencapaian tujuan pembangunan bidang Kesehatan akan berdampak positif pada kualitas produktifitas penduduk. Akan tetapi kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan namun hal tersebut tidak dibiarkan, karena pada dasarnya kesehatan merupakan syarat dimana kesehatan dapat meningkatkan kualitas produksinya. Dampak dari hasil tersebut akan sulit untuk mencapai kebutuhan dan akan menyebabkan kemiskinan.³⁷ Dari kelemahan memungkinkan penelitian ini dilakukan.
- d. Belanja pemerintah di bidang Indeks Pembangunan Manusia dijadikan sebagai standar dasar model pembangunan suatu negara atau daerah dalam konteks pembangunan daerah. Seharusnya penduduk yang tinggal di daerah Indeks Pembangunan Manusia tinggi tentu angka kemiskinan daerah tersebut rendah. Oleh karena itu penelitian dilakukan.³⁸ Oleh karena itu penelitian dilakukan. Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi tidak menjamin menurunkan angka kemiskinan. Adanya gejala rendahnya angka harapan hidup, tingkat pendidikan rendah, serta ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan.³⁹ Dari kelemahan memungkinkan penelitian ini dilakukan.
- e. Zakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Zakat diakui sebagai salah satu instrumen penting dalam keuangan sosial islam untuk mengetaskan kemiskinan. Oleh karena itu

³⁶ Evi Nur Fitria and A. Syifa'ul Qulub, "Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 11 (2020): 2303, <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>.

³⁷ Annisa Istikomah et al., "Pengaruh Tingkat Kesehatan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Lampung Tahun 2021-2023" 4 (2025).

³⁸ Muhammad Rusdi, "Pengaruh Index Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Selatan," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 971–81.

³⁹ Aulia Nurlaili Kusuma Wardani, Dhel Juni Pasya, and Juliono Juliono, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science* 14, no. 01 (2023): 06–11, <https://doi.org/10.52657/jiem.v14i01.2045>.

penelitian dilakukan.⁴⁰ Peran zakat bagi sebagian umat islam yang belum mampu secara finansial. Karena zakat bukanlah sekedar memberikan bahan pangan yang hanya sekedar cukup untuk menghidupi penerimanya dalam beberapa hari kedepannya, tetapi setelah hal itu penerima kembali kepada kemiskinan dan menanti belas kasihan orang lain. Sesungguhnya peran zakat adalah bagaimana seorang mustahiq dapat menghidupi dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan usahanya sendiri.⁴¹ Adanya kesenjangan tersebut maka penelitian ini dilakukan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berfokus pada empat variabel independen, yaitu Pengaruh Belanja Pemerintah Di bidang Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), Indeks Pembangunan Manusia (X3), Zakat (X4) satu variabel dependen Kemiskinan (Y) serta satu variabel Moderasi Pengangguran (Z).
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik dan publikasi Badan Amil Zakat Nasional secara berturut-turut selama 10 tahun (2014-2023) di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dengan demikian, penelitian ini hanya akan mengkaji pengaruh Pengaruh Belanja Pemerintah Di bidang Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat terhadap Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai variabel Moderasi di Jawa Timur Periode 2014-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut, antara lain:

⁴⁰ Razali Ade, Syahputra Hasibuan, and Muhammad Zaid, "ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN MALAYSIA-A SYSTEMATIC REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS" 7, no. 2 (2024): 31–54.

⁴¹ Maghfirah Maghfirah, "Zakat Management and Poverty Alleviation in Indonesia," *Jurisdictie* 11, no. 2 (2021): 286–313, <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.9261>.

1. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia, dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
3. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
4. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
5. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
6. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan, kemiskinan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
7. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan, kemiskinan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
8. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang indeks pembangunan manusia, kemiskinan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
9. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang zakat, kemiskinan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia, dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023.
2. Untuk menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023.
3. Untuk menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023.

4. Untuk menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023.
5. Untuk menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023.
6. Untuk menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan, kemiskinan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023.
7. Untuk menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan, kemiskinan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023.
8. Untuk menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang indeks pembangunan manusia, kemiskinan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023.
9. Untuk menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang zakat, kemiskinan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023.

E. Hipotesis Penelitian

Pada penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif yang menggunakan sampel untuk diperlakukan kepada populasi, maka peneliti harus melakukan hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan teori hubungan yang telah diuraikan diatas. Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

1. Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), Indeks Pembangunan Manusia (X3) dan Zakat (x4) terhadap Kemiskinan (Y)
 H_a : Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur.
2. Pendidikan (X1) terhadap Kemiskinan (Y)
 H_a : Pendidikan diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Pengaruh positif signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi Pendidikan yang diberikan, akan meningkatkan Kemiskinan di Jawa Timur. Sedangkan signifikan berarti bahwa pengaruh positif pada sampel berlaku pula pada pengaruh positif populasi.

3. Kesehatan (X₂) terhadap Kemiskinan (Y)

H_a : Kesehatan diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Pengaruh positif signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi Kesehatan yang diberikan, akan meningkatkan Kemiskinan di Jawa Timur. Sedangkan signifikan berarti bahwa pengaruh positif pada sampel berlaku pula pada pengaruh positif populasi.

4. Indeks Pembangunan Manusia (X₃) terhadap Kemiskinan (Y)

H_a : Indeks Pembangunan Manusia diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Pengaruh positif signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia yang diberikan, akan meningkatkan Kemiskinan di Jawa Timur. Sedangkan signifikan berarti bahwa pengaruh positif pada sampel berlaku pula pada pengaruh positif populasi.

5. Zakat (X₄) terhadap Kemiskinan (Y)

H_a : Zakat diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Pengaruh positif signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi Zakat yang diberikan, akan meningkatkan Kemiskinan di Jawa Timur. Sedangkan signifikan berarti bahwa pengaruh positif pada sampel berlaku pula pada pengaruh positif populasi.

6. Pendidikan (X₁), Kemiskinan (Y) terhadap Pengangguran (Z)

H_a : Pendidikan, Kemiskinan diduga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengangguran di Jawa Timur. Pengaruh negatif dan tidak signifikan ini berarti bahwa semakin rendah Pendidikan, Kemiskinan yang diberikan, akan meningkatkan Pengangguran di Jawa Timur. Sedangkan tidak signifikan berarti bahwa pengaruh negatif pada sampel berlaku pula pada pengaruh negatif populasi.

7. Kesehatan (X₂), Kemiskinan (Y) terhadap Pengangguran (Z)

H_a : Kesehatan, Kemiskinan diduga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Jawa Timur. Pengaruh negatif dan tidak signifikan ini berarti bahwa semakin rendah Kesehatan, Kemiskinan yang diberikan, akan meningkatkan Pengangguran di Jawa

Timur. Sedangkan tidak signifikan berarti bahwa pengaruh negatif pada sampel berlaku pula pada pengaruh negatif populasi.

8. Indeks Pembangunan Manusia (X_3), Kemiskinan (Y) terhadap Pengangguran (Z)

H_a : Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengangguran di Jawa Timur. Pengaruh negatif tidak signifikan ini berarti bahwa semakin rendah indeks pembangunan manusia, kemiskinan yang diberikan, akan meningkatkan pengangguran di Jawa Timur. Sedangkan signifikan berarti bahwa pengaruh negatif pada sampel berlaku pula pada pengaruh negatif populasi.

9. Zakat (X_3), Kemiskinan (Y) terhadap Pengangguran (Z)

H_a : Zakat, Kemiskinan diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Pengangguran di Jawa Timur. Pengaruh positif signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi indeks pembangunan manusia, kemiskinan yang diberikan, akan meningkatkan pengangguran di Jawa Timur. Sedangkan signifikan berarti bahwa pengaruh positif pada sampel berlaku pula pada pengaruh positif populasi.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia dan zakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia dan zakat di Jawa Timur, kemudian sebagai bahan referensi untuk Badan Pusat Statistik

mengetahui kelajuan kemiskinan melalui beberapa pendekatan yang telah diteliti.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah informasi dan pengetahuan serta menyumbang hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang kemiskinan.

G. Penegasan Istilah

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berkaitan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Tujuan dari definisi konseptual adalah untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal ini. Definisi konseptual ini berlandaskan pada referensi yang telah dipergunakan. Secara konseptual yang dimaksud dengan pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia dan zakat terhadap kemiskinan di kabupaten Se-Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023 sebagai berikut:

a. Belanja Pemerintah bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi yang akan selalu berdampak pada waktu yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan suatu wilayah. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kemampuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan secara berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan sangat

tergantung pada kualitas kesehatan yang dimiliki. Usia harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan.⁴²

b. Belanja Pemerintah bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.⁴³

c. Indeks pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran komparatif harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Indeks Pembangunan Manusia menerangkan bagaimana pendapatan penduduk, perawatan kesehatan, dan pendidikan. dapat mengarah pada hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur untuk dampak yang dihasilkan oleh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan untuk menentukan apakah suatu negara tergolong sebagai Negara yang maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.⁴⁴

d. Zakat

Zakat adalah bagian dari rukun Islam artinya zakat merupakan salah satu pilar utama bangunan Islam dan merupakan ajaran pokok dan fundamental dalam Islam.⁴⁵ Menurut Wahbah Az-Zuhaili, seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri sepakat hukum zakat adalah wajib.⁴⁶ Mengingkari kewajiban zakat dinilai sebuah bentuk kekufuran.

⁴² Laily Dwi Arsyianti Irfan Syauqi Beik, *EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). Hal. 150

⁴³ Abdillah Ahsan et al., *Pengantar Ekonomi Kesehatan, PPJK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (Jakarta: PPJK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Hal. 24

⁴⁴ Irfan Syauqi Beik, *EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH*. Hal. 148

⁴⁵ Yūsuf Al-Qaraḍawī, *Fiqh Az-Zakāh* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1973). Hal. 73

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh, Jld. 2* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989). Hal. 734

Abu Yūsuf menegaskan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dilarang menolak berzakat.⁴⁷

e. Kemiskinan

Kemiskinan adalah anggapan sebagai kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimum.⁴⁸ Kemiskinan juga dinilai sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti kesehatan, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati orang lain.

2. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang diteliti. Variabel penelitian ini terdiri dari dua macam variabel, yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Penegasan operasional dalam penelitian ini meliputi:

a. Belanja Pemerintah bidang Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Melek Huruf (AMH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Se-Jawa Timur.

b. Belanja Pemerintah bidang Kesehatan

Kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat

c. Indeks pertumbuhan manusia

Indeks pertumbuhan manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yakni Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*),

⁴⁷ Abu Yūsuf Yaʿqub, *Kitab Al-Kharāj* (Beirut: Dar Al-Maʿrifah, 1979). Hal. 89

⁴⁸ Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: Erlangga, 2010).

Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard of living*).

d. Zakat

Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis zakat, jumlah zakat yang diterima dan pengelolaan zakat.

e. Kemiskinan

Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran kemiskinan, indikator kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan dan karakteristik kemiskinan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan Tesis ini lebih tersusun dan terarah, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat kerangka teoritik yang berisikan teori-teori tentang pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia, zakat, kemiskinan, penelitian terkait, keterkaitan antar variabel dan memuat tentang penelitian terkait serta dijelaskan juga mengenai kerangka hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan metode penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini meliputi uraian jenis penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL

Merupakan bab yang berisi (a) deskripsi obyek penelitian, (b) karakteristik responden, (c) hasil penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pengolahan data atau hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori yang ada dengan tujuan memberikan jawaban dari hipotesis penelitian.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai (a) kesimpulan dari pembahasan dan memberikan (b) saran berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan.